

KAUM PEREMPUAN DAN PARTISIPASINYA DALAM PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN MALANG

Akbar Pandu Dwinugraha¹

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Merdeka Malang,
Jalan Terusan Raya Dieng No. 62-64, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia
* E-mail: akbar.dwi@unmer.ac.id

Abstract

The purpose of this research is to find out how far women are involved in village governance. This research uses descriptive qualitative and quantitative research types or better known as combination research. The research location is the Malang Regency administration area in the period January-August 2017. Based on the results of data collection and analysis in the field, it can be concluded that (1) Women's participation in coaching, empowering and providing opportunities in terms of conveying aspirations to the government has been carried out in Malang Regency, This is without exception carried out in under developed, developed and advanced. (2) Opportunities for women to be elected / nominated as village heads, village officials, members of the BPD (Village Consultative Organization) and LKD (Village Community Institutions) starting from the underdeveloped, developed and advanced, wide open and there is no difference in access given to the wider community. (3) Women in the underdeveloped, developed and advanced have received protection from the disruption of peace in the village, have received maximum fair services and received information about village development plans and implementation by the village government. (4) Women in the underdeveloped, developed and advanced villages are given the same rights in overseeing village government, are involved in village deliberations and are given the same opportunity to submit complaints about village development planning and implementation to the village government.

Article Histori:

Submitted: 06/09/2019

Editing: 09/10/2019

Publish: 21/10/2019

Keyword: *Participation, Women village governance*

1. PENDAHULUAN

Partisipasi merupakan keterlibatan dan keikutsertaan yang keduanya mengandung kesamaan meski memiliki penekanan arti

yang berbeda. Menurut Narayan dalam (Eko, 2003) Keterlibatan terkait siapa saja yang terlibat sedangkan keikutsertaan terkait bagaimana masyarakat terlibat.

Partisipasi oleh masyarakat dapat diartikan pula sebagai bentuk pencapaian dari kelompok masyarakat dalam level yang lebih tinggi (masyarakat madani). Soetrisno (1995:207) mendefinisikan partisipasi sebagai kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang ditentukan dan tujuannya oleh pemerintah. Dukungan secara mutlak tersebut bukan hanya sekedar dalam rangka pelaksanaan program tetapi juga dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam memberikan umpan balik sebagai proses evaluasi setelah program pemerintah tersebut selesai dijalankan. Keadaan ini memposisikan partisipasi masyarakat menjadi sesuatu yang sangat krusial dan penting dalam proses pembangunan pemerintahan.

Terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan (Conyers, 1994:154). Tiga hal tersebut meliputi (1)Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. (2)Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. (3)Timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri, serta dilibatkan untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka.

Alasan utama yang melandasi sejauhmana pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut akan menjadi lebih sempurna apabila setiap masyarakat terlibat dalam tiga tahapan partisipasi masyarakat. Tjokromidjojo (1998:104) mengungkapkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi atas tiga tahapan yang meliputi (1) Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah. (2)Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. (3)Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan secara berkeadilan.

Partisipasi masyarakat semacam itu tidak hanya dibutuhkan oleh pemerintah dalam level pusat, propinsi maupun pemerintah daerah tetapi juga sangat dibutuhkan di level pemerintah desa. Partisipasi dalam pemerintahan desa seharusnya bukan sekedar keterlibatan masyarakat dalam proses pemilihan kepala Desa, tetapi juga partisipasi dalam kehidupan sehari-hari yang berurusan dengan pembangunan dan pemerintahan desa.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerjasama dengan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan di Tahun 2007 telah menyusun buku panduan analisis gender untuk perencanaan pembangunan. Panduan tersebut disusun dan menghasilkan lensa gender yang meliputi faktor akses, manfaat, partisipasi dan kontrol. Lensa tersebut diharapkan menjadi alat untuk mengetahui potensi yang menimbulkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki baik sebagai obyek maupun subyek pembangunan. Harapannya dengan menggunakan lensa gender, akan diketahui sejauhmana partisipasi perempuan dalam

suatu daerah terhadap pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan pertimbangan tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana partisipasi kaum perempuan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Malang.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif atau lebih dikenal dengan penelitian kombinasi (*Mix Methode*). Penelitian jenis ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (Creswell,2009). Lokasi penelitian adalah wilayah administratif Kabupaten Malang periode bulan Januari-Agustus 2017. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan kuesioner dengan metode cluster sampling. Area kecamatan terpilih sebagai cluster meliputi wilayah Kecamatan Kepanjen, Gondanglegi dan Pagak yang merupakan daerah penyangga perkembangan Kabupaten Malang. Disetiap wilayah kecamatan tersebut dilakukan klasterisasi desa berdasarkan Permendagri No. 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan yang mana desa dikategorikan kedalam level mula, madya dan lanjut. Berdasarkan kriteria tersebut lokasi terpilih meliputi klaster Kecamatan Kepanjen yaitu Desa Ngadilangkung, Dilem, Mangunrejo, Jenggolo dan Sengguruh. Klaster Kecamatan Pagak diantaranya Desa Pagak,Sumberejo dan Gampingan. Serta klaster Kecamatan Gondanglegi yang meliputi Desa Gondanglegi Kulon, Gondanglegi Wetan, Putat Lor dan Urek-urek.

Instrument penelitian ini adalah kuesioner terstruktur dengan

menggunakan skala likert yang disusun menyesuaikan fokus penelitian yang meliputi aspek partisipasi, akses, manfaat dan kontrol. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan data primer yang merupakan data yang diperoleh dari masyarakat (responden) melalui pengisian kuesioner sebagai representasi dari pengumpulan data kuantitatif dan observasi serta interview secara langsung dengan masyarakat sebagai representasi pengumpulan data kualitatif.

Analisis data dibagi menjadi beberapa tahap meliputi. Tahap pertama kuesioner yang telah diisi dilakukan koding kedalam pengklasifikasian desa mula, madya dan lanjut. Tahap kedua kuesioner yang telah dikoding tersebut dilakukan input data dengan penyesuaian indikator menyesuaikan fokus penelitian dan kategori skala likert yang meliputi tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering dan sangat sering. Tahap ketiga data tersebut dilakukan tabulasi yang menggambarkan kondisi eksisting terhadap topik yang diteliti untuk dihasilkan analisis lebih lanjut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Partisipasi kaum perempuan dalam hal mendapatkan pembinaan kemasyarakatan desa merupakan suatu hal yang selalu akan dilakukan karena merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah desa dalam hal ini yaitu kepala desa dalam penyelenggaraannya. Pembinaan secara umum diartikan sebagai upaya untuk memberi/mendapatkan pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu.

Tabel 1. Rekapitulasi Data Hasil Penelitian

Fokus		Partisipasi (dalam %)			Akses (dalam %)			Manfaat (dalam %)			Kontrol (dalam %)		
Indikator		P1	P2	P3	A1	A2	A3	M1	M2	M3	K1	K2	K3
Desa Berkategori Mula	TP	16	17	7	33	17	26	10	10	21	28	9	10
	JR	17	28	13	27	8	26	5	11	10	28	26	40
	KK	28	5	27	13	33	32	25	26	58	28	39	15
	S	39	50	53	27	42	16	45	42	11	16	22	35
	SS	0	0	0	0	0	0	15	11	0	0	4	0
Desa Berkategori Madya	TP	0	11	0	23	6	0	0	0	5	7	11	5
	JR	13	33	18	31	25	42	17	12	1	13	5	11
	KK	33	6	18	15	44	50	22	29	52	33	21	26
	S	47	39	41	31	12	8	50	47	19	27	47	37
	SS	7	11	23	0	13	0	11	12	14	20	16	21
Desa Berkategori Lanjut	TP	0	0	0	47	0	0	9	0	0	19	0	0
	JR	19	23	6	21	21	33	24	10	10	25	22	15
	KK	37	18	31	11	29	47	19	30	40	25	44	23
	S	31	45	50	21	36	20	43	40	30	19	28	54
	SS	13	14	13	0	14	0	5	20	20	12	6	8

Sumber: Data Peneliti yang diolah (2017)

Tabel 1 diatas dihimpun berdasarkan kuesioner yang telah disebarakan kepada masyarakat. Responden maupun informan diberikan pilihan jawaban yang meliputi (TP)Tidak Pernah, (JR)Jarang, KK(kadang-kadang), (S)Sering, (SS)Sangat Sering. Sedangkan fokus yang diteliti meliputi Faktor partisipasi yang terdiri dari (P1)Apakah kaum perempuan dilibatkan dalam pembinaan kemasyarakatan desa, (P2)Apakah kaum perempuan dilibatkan dalam pemberdayaan masyarakat desa, (P3) Apakah kaum perempuan diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi,saran dan pendapat secara bertanggungjawab tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Faktor Akses yang meliputi (A1)Apakah kaum perempuan diberi kesempatan untuk memilih/dipilih atau ditetapkan menjadi kepala desa, (A2)Apakah kaum perempuan diberikan kesempatan untuk memilih/dipilih atau ditetapkan menjadi perangkat desa,

(A3)Apakah kaum perempuan diberikan akses untuk memilih/dipilih menjadi anggota badan permusyawaratan desa dan lembaga kemasyarakatan desa. Manfaat meliputi (M1)Apakah kaum perempuan mendapat pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban desa, (M2)apakah kaum perempuan memperoleh pelayanan yang sama dan adil oleh pemerintah desa, (M3)apakah kaum perempuan mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa oleh pemerintah desa. Terakhir adalah faktor Kontrol yang meliputi (K1)Apakah kaum perempuan diberikan hak untuk mengawasi kegiatan pemerintah desa, (K2)Apakah kaum perempuan dilibatkan dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa, (K3)Apakah masyarakat desa diberikan kesempatan untuk menyampaikan keluhan terhadap perencanaan, pelaksanaan pembangunan desa.

Pembahasan Partisipasi

Partisipasi kaum perempuan dalam hal mendapatkan pembinaan kemasyarakatan desa merupakan suatu hal yang selalu akan dilakukan karena merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah desa dalam hal ini yaitu kepala desa dalam penyelenggaraannya. Pembinaan secara umum diartikan sebagai upaya untuk memberi/mendapatkan pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu

Kondisi yang terjadi di desa dengan level mula, dan Madya intensitas masyarakat desa terutama kaum perempuan dalam pelibatangannya terhadap pembinaan kemasyarakatan desa termasuk sering dilibatkan. Hal ini berarti kepala desa sering melibatkan masyarakat dan kaum perempuan sebagai subyek dan obyek pembinaan masyarakat. Sama halnya dengan yang terjadi di desa dengan level madya, bahwa intensitas keterlibatan masyarakat terutama kaum perempuan dalam pembinaan tergolong sering, persentase yang didapat melebihi dari yang diperoleh oleh desa level mula. Berdasarkan hasil analisis dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan teknik wawancara dua level desa yaitu mula dan madya memang menggiatkan upaya pembinaan dan pelibatan partisipasi masyarakat terutama kaum perempuan dalam pembinaan karena sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah petani.

Hal tersebut berbeda dengan yang terjadi di desa lanjut yang mana pelibatan masyarakat terutama kaum perempuan berada dalam level sedang, atau berdasarkan intensitasnya berada di bawah desa level madya dan mula. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dilapangan, dikarenakan sebagian besar dari masyarakat di desa level lanjut lebih modern dan mata

pencaharian mereka lebih dominan di bidang jasa, perdagangan dan industri.

Selain pembinaan, upaya pemberdayaan juga merupakan kegiatan yang sangat penting di pemerintahan desa, dala suatu kasus yang sering terjadi di masyarakat bahwa bentuk usulan yang sering dilontarkan masyarakat dalam kegiatan musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan terutama di level desa adalah usulan dalam bentuk phisik atau bangunan jadi. Masyarakat enggan mengusulkan usulan pemberdayaan yang sebenarnya menjadi hal yang lebih bermanfaat bagi keberdayaan masyarakat desa. Hal tersebut menjadi penting karena pemberdayaan mengacu pada kata "empowerment," yang berarti memberi daya, memberi "power" (kuasa), kekuatan, kepada pihak yang kurang berdaya.

Intensitas pemberdayaan yang terjadi di desa level mula, madya dan lanjut tidak mengalami perbedaan. Intensitas pemberdayaan yang dilakukan oleh kepala desa kepada masyarakat terutama kaum perempuan tergolong tinggi. Berdasarkan hasil analisis kualitatif yang dilakukan, pemberdayaan merupakan salah satu kegiatan pemerintah desa yang terlepas apakah masyarakat mengusulkan atau tidak dalam musrenbang level desa, selalu akan tetap diprogramkan dan dilanjutkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan hasil penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan teknik wawancara, masyarakat seringkali diarahkan dalam memberikan aspirasi terutama dalam bentuk usulan yang diajukan di kegiatan musrenbang level desa. Arahan tersebut berupa ajakan kepada masyarakat terutama kaum perempuan untuk jangan terlalu melulu mengusulkan kegiatan dalam bentuk phisik bangunan seperti gapura yang meskipun itu penting

tetapi secara kemanfaatan tidak berkelanjutan bagi masyarakat desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan seringkali disarankan dan disosialisasikan oleh pemerintah desa dalam mengarahkan masyarakat dalam pengajuan usulan musrenbang dalam level desa.

Akses

Akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. Mempertimbangkan bagaimana memperoleh akses yang adil dan setara antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan laki-laki terhadap sumberdaya yang akan dibuat. Akses dalam hubungannya dengan kesetaraan gender mencoba untuk melihat yang pertama sejauh mana intensitas masyarakat terutama kaum perempuan diberikan kesempatan untuk memilih/dipilih atau ditetapkan untuk menjadi kepala desa.

Akses dalam hal kesempatan untuk memilih dan dipilih atau ditetapkan menjadi kepala desa di desa level mula tergolong rendah. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar kepala desa yang berada di desa mula kebanyakan diisi oleh kepala desa berjenis kelamin laki-laki. Kalaupun ada beberapa desa dengan kepala desa perempuan, hal tersebut tidak lepas dari yang namanya hubungan keluarga dengan kepala desa sebelumnya. Sedangkan kondisi yang terjadi di desa level madya tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di desa level mula, bahwa intensitas masyarakat terutama kaum perempuan diberikan kesempatan untuk memilih dan dipilih atau ditetapkan untuk menjadi kepala desa tergolong rendah. Begitu halnya dengan yang terjadi di desa level lanjut intensitas kesempatan yang diberikan kepada masyarakat terutama kaum perempuan untuk memilih dipilih atau ditetapkan untuk menjadi kepala desa tergolong rendah, bahkan dominasi responden

banyak memilih pilihan tidak pernah untuk skala likert berdasarkan kuesioner yang diberikan.

Kondisi yang terjadi di desa level mula, madya dan lanjut tidak ada perbedaan yang terlalu mencolok, masing-masing level desa sebenarnya memberikan kesempatan yang besar terhadap masyarakat terutama kaum perempuan untuk menjadi perangkat desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa perangkat desa bahwasannya perangkat desa wanita dilihat dari kinerjanya lebih teliti dan telaten dalam menyelesaikan kegiatan-kegiatan administratif. Hal ini yang membuktikan bahwa terdapat kesempatan yang sama kepada masyarakat terutama kaum perempuan untuk menjadi perangkat desa.

Untuk desa level mula, kesempatan dari masyarakat terutama kaum perempuan untuk memilih atau dipilih menjadi anggota BPD dan LKD tergolong rendah, berbeda halnya dengan yang terjadi di desa level madya dan lanjut. Untuk desa level tersebut kesempatan terhadap masyarakat terutama kaum perempuan tergolong sedang yang berarti terdapat kecenderungan yang memberikan kesempatan terbuka bagi masyarakat terutama kaum perempuan untuk dipilih atau ditetapkan menjadi anggota BPD dan LKD.

Manfaat

Manfaat adalah kegunaan yang dapat dinikmati secara optimal. Keputusan yang diambil dalam memberikan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki. Dalam kaitannya dengan pemerintahan desa, manfaat dalam hal ini adalah penyelenggaraan pemerintahan desa yang secara langsung bisa dinikmati oleh kaum perempuan di desa tersebut. Seringkali yang terjadi saat ini, seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa didominasi oleh kaum laki-laki, hal ini dikarenakan budaya yang berada di desa memang berbeda dengan yang telah terjadi

di kota yang mana kaum perempuan banyak memegang pucuk kepemimpinan

Intensitas masyarakat terutama kaum perempuan dalam mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di desa tergolong tinggi di ketiga level desa. Dalam hal ini pengayoman dan perlindungan di desa menjadi suatu hal yang memang selalu terus dijaga. Hal ini karena budaya masyarakat desa yang masih tergolong guyub menghasilkan suatu perlindungan tersendiri dari tindakan-tindakan kelompok yang ingin melakukan suatu gangguan. Bisa diartikan bahwa pengayoman dan perlindungan terhadap gangguan terutama untuk kaum perempuan di desa terbantu oleh budaya dari masyarakat desa itu sendiri yang masih memegang budaya paguyuban. Berbeda halnya dengan yang terjadi di kota yang telah terbiasa dengan individualistis dan acuh terhadap segala sesuatu yang terjadi disekitarnya.

Pelayanan yang terselenggara oleh kantor desa telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terutama kaum perempuan di desa mulai level desa mula, madya maupun lanjut. Karena berdasarkan hasil responden yang peneliti kumpulkan dihasilkan bahwa intensitas masyarakat dan terutama kaum perempuan dalam memperoleh pelayanan yang sama dan adil oleh pemerintah tergolong tinggi atau sebagian besar dari responden memilih sering mendapat pelayanan yang sama dan adil dari pemerintah desa.

Informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa oleh pemerintah desa telah disampaikan kepada masyarakat terutama kaum perempuan. Hal ini berdasarkan hasil responden di desa dalam level mula dan madya yang mana tergolong dalam level sedang meskipun sebagian besar responden memilih kadang-

kadang dalam tingkat intensitas pemberian informasi tersebut. Berbeda halnya dengan yang terjadi di desa dalam level lanjut, bahwa tingkat intensitas masyarakat mendapatkan informasi terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan desa tergolong tinggi. Ternyata berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di desa-desa dengan level lanjut ini, penyampaian informasi terkait musrenbang dan pelaksanaan hasil musrenbang dilakukan secara terbuka dan transparan. Meskipun masyarakat menganggap salah satu kepala desa di desa dengan level lanjut tersebut masih terkesan tidak terlalu banyak bicara tetapi keterbukaan dan transparansi anggaran pelaksanaan pembangunan dipaparkan secara terbuka untuk masyarakat dan kaum perempuan.

Kontrol

Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini apakah pemegang jabatan kepala desa sebagai pengambil keputusan didominasi oleh gender tertentu atau tidak. Serta kepala desa sebagai pengambil keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa bersedia untuk diawasi oleh masyarakat terutama kaum perempuan dalam pelaksanaan kegiatannya. Indikator kontrol dalam menganalisis kesetaraan gender yang berlangsung di desa di Kabupaten Malang ditelaah berdasarkan beberapa sub indikator antara lain melihat intensitas masyarakat terutama kaum perempuan diberikan hak untuk mengawasi kegiatan pemerintah desa, intensitas masyarakat diikutsertakan untuk musyawarah untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa serta diberikan kesempatan menyampaikan keluhan terhadap pelaksanaan perencanaan dan pembangunan di desa.



Intensitas masyarakat desa terutama kaum perempuan diberikan hak untuk mengawasi kegiatan pemerintah desa di desa dengan level mula tergolong rendah, hal ini berarti terdapat kecenderungan terhadap ketidak terbukaan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, berbeda halnya dengan yang terjadi di desa dengan level madya dan lanjut, yang mana intensitas dari pemerintah desa dalam memberikan hak kepada masyarakat terutama kaum perempuan untuk mengawasi kegiatan pemerintah desa tergolong tinggi atau kecenderungan yang terjadi adalah keterbukaan yang seluas-luasnya diberikan oleh pemerintah desa kepada masyarakatnya dalam hal pengawasan kegiatan desa

Intensitas masyarakat dilibatkan dalam musyawarah desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa dengan level mula dan lanjut tergolong sedang, berbeda halnya dengan desa dengan level madya yang tergolong tinggi. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di beberapa desa yang tergolong desa mula, madya dan lanjut, pelibatan masyarakat terutama kaum perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa selalu akan dilakukan. Kehadiran dari seluruh *stake holder* sangat dibutuhkan untuk menjaring aspirasi dalam melaksanakan kehidupan yang demokratis.

Kondisi yang terjadi di desa mula cenderung rendah dalam pemberian kesempatan untuk menyampaikan keluhan terkait perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, berbeda halnya dengan yang terjadi di desa dalam level madya dan lanjut, yang mana intensitas yang dicapai tergolong tinggi. Kondisi ini memiliki arti kecenderungan pemerintah desa memberikan keleluasaan bagi masyarakat terutama kaum perempuan untuk menyampaikan keluhannya terkait perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan desa. Keleluasaan tersebut sangat erat kaitannya dengan keterbukaan dan transparansi dari pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Semakin terbuka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan keleluasaan terhadap keluhan yang nantinya akan disampaikan juga akan semakin tinggi dan begitu halnya sebaliknya.

4. PENUTUP

Partisipasi perempuan dalam pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan dan pemberian kesempatan dalam menyampaikan aspirasi telah terjalankan di Kabupaten Malang tanpa terkecuali termasuk desa dalam kategori mula, madya maupun lanjut; Peluang dan kesempatan dari kaum perempuan untuk dipilih/dicalonkan menjadi kepala desa, perangkat desa, anggota BPD dan LKD dari desa mula, madya maupun lanjut dibuka seluas-luasnya dan tidak ada perbedaan terhadap akses dan kesempatan yang diberikan kepada masyarakat luas; Kaum perempuan di desa mula, madya dan lanjut telah mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman didesa, memperoleh pelayanan maksimal yang adil serta mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa oleh pemerintah desa; Kaum perempuan di desa mula, madya dan lanjut diberikan hak yang sama dalam mengawasi pemerintahan desa, dilibatkan dalam musyawarah desa serta diberikan peluang yang sama untuk menyampaikan keluhan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa.

5. DAFTAR PUSTAKA

Conyers, D. (1994). *Perencanaan Sosial (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Gadjah Mada. University Press.

- Creswell, John W. (2009). *Research Design Pendekatan Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Penterjemah Achmad Fawaid.
- Eko, Sutoro, dkk. (2003). *Pembaharuan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: IRE Press
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (2007) *Gender Analysis Pathway*. Jakarta: Bappenas
- Soetrisno, L. (1995). *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Tjokromidjojo, B. (1998). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: CV Haji Masagung.

